

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman. 1995. Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia. Bandung. Alumni.
- Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Bruce A. Chadewick, Howard M. Bahr, Stan L. Albrecht. 1991. Social Science Research Methods. Terjemahan Sulistia "et al".
- Burhan Ashshofa. 2000. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Efendi, Bachtiar. 1993. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Jakarta.
- Harsono, Boedi. 1998. Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan Hukum-hukum Tanah. Jakarta. Djambatan.
- Koentjaraningrat. 1993. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta :Gramedia.
- Parlindungan. 1999. Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Bandung. CV. Mandar Maju.
- Parlindungan. 1990. Konversi Hak Atas Tanah. Bandung. CV. Mandar maju.
- Perangin, Effendi. 1990. Hukum Agraria Indonesi, Suatu Telaah dari Sudut Praktisi Hukum. Jakarta. CV Rajawali.
- Perangin, Effendi. 1991. Praktek Permohonan Hak Atas Tanah. Jakarta. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research, yayasan penerbitan fakultas psikologi UGM, Yogyakarta.
- Tiarawati Poniskori. Pendafrtan Tanah Secara Sporadik Menurut PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendafrtan Tanah. 149, maret-april 2017.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Umar Said Sugiharto, 2017, hukum pengadaan tanah, setara press.
- Urip santoso, 2010, pendaftaran dan peralihan Hak Atas Tanah, Cetakan ke-2, kencana, Jakarta.

Perundang-Undangan

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Pemerintah RI nomor 128 tahun 2015,

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (LN 1997 No.59) tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (LN 1997 No. 59) tentang Pendaftaran Tanah.

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatra Utara Nomor : SK. 246/KEP-12.06/III/2021 tentang Tarif Biaya Pengukuran dan Bidang Tanah Pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Karo.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria.

Karokab.go.id,

Jurnal

Bambang Eko Muljono. 2016. Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Melalui Pengakuan Hak. Universitas Islam Lamongan.

Ratih Novinati. 2010. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Yang di Lakukan Tuan X di Desa Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Universitas Indonesia

Tiarawati Poniskori. 2017. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Menurut PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Univeristas Sam Ratulangi Manado.

Wawancara

Adlina Silalahi S.H., M.Kn. ATR BPN Kabupaten Karo. Kepala Bidang Tata Ruang Tahun 2022.

Website

Kab-karo@atrbtn.go.id, sekilas-pusat. 1 des 2022.

Kab-karo@atrbtn.go.id profil kepala kantor, 1 des 2022.

Bpn.go.id, Karo 23 maret 2023

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan pertanahan Nasional

KaroKab.go.id. dalam angka 2015

KaroKab.go.id Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, September 2020, 22 Maret 2023

Karokab.go.id,. Luas wilayah di Kabupaten Karo, Desa/Kelurahan, Kecamatan, 22 Maret 2023.

